

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era perang dingin kawasan Asia Tenggara telah menjadi ajang persaingan ideologi antarkepentingan kekuatan-kekuatan adidaya dunia pada saat itu. Hal itu disebabkan nilai strategis yang dimiliki kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geo-ekonomi.¹

Perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan Blok Komunis pimpinan Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat merupakan salah satu bukti persaingan di atas. Persaingan dua blok ideologi tersebut melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok Komunis menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina.

Gejolak yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak hanya terjadi karena persaingan di bidang ideologi antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur. Konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara (yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan konflik bilateral (seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia,

¹ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN kementerian Luar Negeri RI, *ASEAN Selayang Pandang edisi ke-20*, (Jakarta: 2012), hlm.1.

Kamboja dan Vietnam) serta konflik internal (seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia) telah memperkeruh suasana di kawasan ini.²

Situasi persaingan, pengaruh ideologi dan kekuatan militer yang dapat melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik bersenjata yang mengganggu stabilitas kawasan mendorong para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan suasana aman dan damai. Dengan kondisi aman dan damai memungkinkan terbentuknya suatu kerjasama yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara negara anggota serta mendorong usaha pembangunan bersama di kawasan.

Sebelum terbentuknya ASEAN setidaknya ada beberapa organisasi antarnegara di wilayah ini seperti *South East Asia Treaty Organization* (SEATO, terbentuk tahun 1954), *Association of Southeast Asia* (ASA dibentuk tahun 1961), dan *Malaysia-Philippine-Indonesia* (Maphilindo, dibentuk tahun 1963). Organisasi-organisasi tersebut tidak dapat bertahan lama karena berbagai sebab antara lain pertentangan ideologi dan sengketa teritorial antar negara anggotanya sendiri.³

Kegagalan-kegagalan tersebut membuat para pemimpin di kawasan terdorong untuk membentuk suatu organisasi kerjasama yang lebih baik. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan

²Ibid.

³Ibid., hlm. 1-2.

Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) menyepakati deklarasi bersama (*Joint Declaration*) dan menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok.⁴

Ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia Nations/ASEAN*) telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.⁵

ASEAN kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan kesepakatan *Bali Concord I* tahun 1967. Dalam *Bali Concord I* tersebut, para pemimpin ASEAN menyepakati program aksi yang mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN.

Pada perkembangan selanjutnya ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang

⁴Ibid., hlm. 2.

⁵Ibid., hlm. 3.

terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu, menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*).

Melalui *Bali Concord II*, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju suatu Komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN terdiri atas tiga pilar, yaitu Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), dan Pilar Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Ketiga pilar komunitas ASEAN itu terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan bersama yang abadi. Dalam kaitan itu, Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN serta memerankan peran penting di dua pilar lainnya.

ASEAN Community 2015 atau Komunitas ASEAN (Associations of South East Asian Nations) 2015 merupakan era saling terbuka ke sesama negara dalam kawasan Asia Tenggara yang dihasilkan melalui KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-20, pada 3-4 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja⁶, yang akan dimulai pada tahun 2015. Dalam KTT tersebut menghasilkan Deklarasi Phnom Penh (Phnom

⁶<http://www.antaranews.com/berita/304708/obama> , pada berita KTT ASEAN ke-20 Berakhir, Rabu, 4 April 2012 14:05 WIB. Diunduh pada Sabtu, 29 November 2013

Penh Declaration on ASEAN : One Community, One Destiny) yang bertujuan untuk menciptakan stabilisasi perekonomian di kawasan Asia Tenggara melalui pasar produksi, keamanan, kedamaian, stabilitas, dan keutuhan negara-negara Asia Tenggara, serta mencegah terjadinya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Komunitas ASEAN juga memiliki tiga pilar penting yang meliputi keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Tujuan dari pilar Keamanan ASEAN adalah negara-negara anggota ASEAN dapat menyelesaikan masalah keamanan dan pertahanan dengan mengatasi kemungkinan konflik secara damai. Dari sisi Ekonomi ASEAN, yaitu dengan mewujudkan ekonomi pasar produksi dan pasar bebas pada negara-negara se-Asia Tenggara, untuk menciptakan stabilitas ekonomi, daya saing produk usaha kecil dan menengah, hingga tercapainya kemakmuran. Dan Sosial Budaya ASEAN meliputi kerjasama di bidang kepemudaan, wanita, kebudayaan, lingkungan hidup, serta pembangunan sosial.

Jika dianalogikan, Komunitas ASEAN adalah seperti EU (European Union), yaitu bentuk kerjasama regional dalam suatu kawasan tertentu. Apabila EU di kawasan Eropa, maka ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara, yang meliputi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunai Darussalam, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar, serta dua negara dalam proses verifikasi yaitu Timur Timor, dan Papua New Guinea.

Dalam rangka untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia,

mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN maka seluruh anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata melalui AEC 2015. AEC 2015 pada dasarnya merupakan sebuah cita-cita dari negara-negara ASEAN yang dibentuk pada tahun 2003 melalui KTT ke-IX di Bali. Target AEC 2015 sendiri adalah untuk memiliki sebuah pasar kompetitif (berdaya saing tinggi) dengan mengubah ASEAN untuk menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi dimana nantinya akan ada aliran bebas barang-barang (free flow), jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan.⁷

Pada tahun 2011 ini Indonesia kembali mengambil inisiatif membawa ASEAN di tingkat kerja sama yang lebih tinggi; menetapkan visi ASEAN setelah 2015 melalui tema “Komunitas ASEAN dalam komunitas global bangsa-bangsa”. Berdasarkan visi itu pada tahun 2020 ASEAN secara kelompok akan berkontribusi lebih besar dalam mengatasi berbagai masalah global. Sebagaimana halnya 1976 dan 2003 Indonesia kembali memastikan adanya keselarasan antara perkembangan di ASEAN dan perkembangan di Indonesia. Selaras dengan semakin meningkatnya

⁷Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju Asean Economic Community 2015*, http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf. Diakses Kamis, 21 Nopember 2013

peran Indonesia di tingkat global. ASEAN pun diharapkan berperan lebih besar menyelesaikan masalah global.

Seluruh kontribusi Indonesia semata-mata dilakukan agar ASEAN dapat senantiasa beradaptasi dengan kondisi dan tantangan di kawasan maupun global. Bukan hanya untuk dapat menyelesaikan tantangan yang saat ini dihadapi, juga menghadapi tantangan ke depan.

Jika disadari benar, sesungguhnya keberadaan ASEAN semua itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Ada dua hal penting yang dimaksudkan sebagai ASEAN berpusat pada masyarakat (*people centered*). Pertama, adalah peningkatan partisipasi (*people driven*), keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kegiatan ASEAN. Kedua menyangkut ruang jelajah manfaat dan relevansi mengingat tuntutan perubahan global. Satu contoh besar bahwa sejak berdirinya ASEAN, relevansi dan manfaat bagi masyarakat sudah digulirkan guna membangun kawasan yang aman, stabil dan tidak bergejolak. Keamanan dan kestabilan adalah produk termahal yang diberikan pada masyarakat. Bermodal stabilitas dan keamanan ini ASEAN bisa melakukan banyak hal.⁸

Keamanan dan stabilitas di kawasan ini tidak sertamerta turun dari langit dan kita peroleh secara Cuma-Cuma. Keamanan bagi seluruh masyarakat ASEAN ini adalah sebuah bukti relevansi sekaligus prestasi ASEAN yang bersejarah. Para pemimpin ASEAN mampu mengelola kawasan dalam iklim yang damai, sehingga

⁸Djauhari Oratmangun, "ASEAN yang memasyarakat" dalam P.L.E Priatna(Ed), *Indonesia dan Ketua ASEAN 2011" Mewujudkan Komunitas ASEAN di Tengah Komunitas Global"*, (mataElang enterprise, 2012), hlm.6

masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Sesuai dengan sifat organisasi, manfaat ASEAN bagi masyarakat sepatutnya, tidak dipahami sebagaimana kita memberi makna pada “lembaga sosial”. ASEAN yang memberi manfaat, bukan harus diartikan, berperan sebagai lembaga sosial. Ibarat badan regional yang bekerja menyalurkan beragam paket bantuan sosial, menyantuni kebutuhan masyarakat di 10 negara ASEAN. Pengertian yang keliru seperti itu, tidak pada tempatnya mereduksi makna ASEAN *people centered* atau membelokan makna ASEAN *people driven* bagi peningkatan partisipasi masyarakat. Membangun rasa kepemilikan, atau yang disebut *structure of belonging* ala Peter Block, dalam bukunya *Community* (Kohler,2008), dengan modal sosial yang cukup melakukan transformasi ke arah integrasi yang solid.⁹

Salah satu tantangan ASEAN kedepan adalah membangun keterlibatan masyarakat yang semakin meningkat. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan kesiapan kita menyambut terwujudnya integrasi regional dalam komunitas ASEAN 2015. Partisipasi yang cerdas berikut mobilisasi kekuatan dalam negeri, terutama dalam rangka merebut peluang ekonomi, sosial dan budaya, terwujudnya masyarakat ASEAN yang lebih terintegrasi.¹⁰

Peran media massa, para pakar dan akademisi, serta masyarakat madani dalam momentum ini sangat penting. Pada tahun 2015, integrasi regional di kawasan ASEAN akan memberi warna baru peta hubungan dan kerjasama antar tetangga.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.,hlm.7

Konektivitas ASEAN membuat ruang gerak kawasan semakin dinamis. Masyarakat memperoleh manfaat baru, misalnya, biaya perjalanan di kawasan semakin kompetitif, murah dan banyak pilihan.¹¹

Wajah baru kawasan, jika kita benar-benar tidak siap, membuat Indonesia terlambat bangun dan kalah cepat merebut peluang yang ada. Menuju 2015 adalah waktu yang sangat singkat dari sekarang untuk melakukan konsolidasi kedalam sekaligus memahami perkembangan yang terjadi serta terus merevitalisasi relevansi ASEAN yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan kerja diplomatiknya, negara-negara anggota ASEAN tentunya harus memiliki pusat diplomatik sama seperti halnya UN yang memiliki markas atau pusat diplomatik di *New York*, Amerika Serikat, EU bertempat di *Brussel*, Belgia. ASEAN pun memiliki markas sejak tahun 1976 di Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2015 nanti saat terselenggaranya Komunitas ASEAN, Jakarta menjadi *Diplomatic Capital* bagi Asia Tenggara. Sebagai Kota Diplomatik ASEAN, Indonesia mendapatkan banyak keuntungan. Namun seperti yang telah kita ketahui Jakarta masih memiliki banyak masalah, diantaranya; banjir, macet, urbanisasi, infrastruktur, dan fasilitas lainnya.

ASEAN *secretariat* sebagai kunci pertumbuhan akan menarik dan menumbuhkan supply dan demand pada beberapa fungsi kawasan : Aktivitas bisnis

¹¹Djauhari Oratmangun, "ASEAN yang memasyarakat" dalam P.L.E Priatna(Ed), *Indonesia dan Ketua ASEAN 2011" Mewujudkan Komunitas ASEAN di Tengah Komunitas Global"*, (mataElang enterprise, 2012), hlm.7.

dan perdagangan, Pengembangan infrastruktur, Pengembangan permukiman, dan Aktivitas MICE & Pariwisata.¹²

Melalui penantian yang cukup lama, Jakarta diresmikan sebagai ibukota diplomatik ASEAN, pada KTT ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012 lalu. Pengesahan ini ditandai dengan penyerahan Piaham Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan ASEAN mengenai ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Sekretariat ASEAN dari Menlu RI Marty Natalegawa kepada Sekjen ASEAN.¹³

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.¹⁴

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan

¹²Bernardus Djonoputro, "JAKARTA 2015 : Diplomatic Capital City", *Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia*, Jakarta, <http://www.iap.or.id>, diunduh pada 27 Nopember 2013.

¹³Fransisca, "Siapkah Jakarta Jadi Tuan Rumah Diplomatik ASEAN", *Kompasiana.com*, Jakarta, 5 September 2013, <http://jakarta.kompasiana.com/potensi-wisata/2013/09/05/siapkan-jakarta-jadi-tuan-rumah-diplomatik-asean-589053.html>, diakses pada Sabtu 29 Nopember 2013.

¹⁴Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Sejarah Jakarta", *Jakarta.go.id*, Jakarta, 10 Juli 2009, <http://www.jakarta.go.id/web/news/1970/01/Sejarah-Jakarta>, diakses pada sabtu 29 Nopember 2013.

kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawaw-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia

secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.¹⁵

Perjanjian Host Country Agreement akan memberikan fasilitas kepada Sekretariat ASEAN yang berlokasi di Jakarta. Perjanjian ini memastikan Sekretariat ASEAN akan dapat beroperasi sebagai nerve centre Komunitas ASEAN sekaligus mempromosikan Jakarta sebagai Ibukota Diplomatik ASEAN.

Dipilihnya Jakarta sebagai Ibukota Diplomatik ASEAN tak lepas dari besarnya pengaruh dan upaya-upaya konkrit yang dilakukan Indonesia dalam mendirikan dan membesarkan ASEAN menjadi organisasi yang disegani dunia dan membawa kemaslahatan bagi anggota-anggotanya. Melihat konsistensi Indonesia berpartisipasi aktif, meletakkan dasar pemikiran, dan mengawal implementasi program-program ASEAN sejak terbentuknya hingga kini, maka penunjukan Jakarta, Ibukota Indonesia, sebagai Ibukota Diplomatik ASEAN adalah langkah tepat. Saat ini sudah ada 54 perwakilan negara sahabat di Indonesia yang duta besarnya

¹⁵Ibid.

terakreditasi sebagai duta besar untuk ASEAN yang memiliki Sekretariat ASEAN di Jakarta. Untuk itu, perlu adanya iklim yang hospitable bagi kehidupan diplomatik di Jakarta.¹⁶

Menjadi ibukota diplomatik ASEAN, pastinya membawa keuntungan untuk Jakarta dan Indonesia. Keuntungan Jakarta sebagai Ibukota Diplomatik ASEAN antara lain adalah membuat Jakarta semakin kokoh posisinya secara politik dan ekonomi, makin sejajar dengan kota-kota internasional lain di dunia, memberikan peluang datangnya lebih banyak turis dari negara ASEAN, dan memberikan peluang ekonomi yang makin besar kepada Jakarta dengan banyaknya turis atau delegasi negara ASEAN yang datang ke Jakarta. Semua ini memungkinkan Jakarta makin makmur.

Jakarta tidak hanya dikenal luas, paling tidak di kawasan ASEAN, sebagai ibukota negara tapi juga sebagai kota tempat berbaga kantor perwakilan negara asing dan lembaga-lembaga dunia membuka kantor cabang. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi ada juga kantor cabang mereka di Jakarta sebagai kantor untuk beberapa negara di ASEAN.¹⁷ Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merancang agar selain pusat bisnis Jakarta juga menjadi salah satu kota di dunia sebagai pusat politik, dalam hal ini diplomatik.

¹⁶Ibid.

¹⁷Syaiful W. Harahap, "Markas Besar ASEAN Menjadikan Jakarta Sebagai Diplomatic City", *Kompasiana.com*, Jakarta, 4 September 2013, <http://jakarta.kompasiana.com/potensi-wisata/2013/09/04/markas-besar-asean-menjadikan-jakarta-sebagai-diplomatic-city--588890.html>, diakses pada Sabtu 29 Nopember 2013.

Hal itu tidaklah angan-angan karena negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam) menjadikan Jakarta (baca: Indonesia) sebagai markas sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariat). Gedung yang menjadi Sekretariat ASEAN terletak di Jalan Sisingamangaraja No 70-A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedung yang terletak di pojok itu membawa warna tersendiri karena di sana berkibar sepuluh bendera negara-negara ASEAN.

Jika dibandingkan dengan kota lain, seperti Singapura, yang menjadi kantor pusat dan perwakilan perusahaan-perusahaan multinasional tentulah Jakarta jauh di bawah Singapura. Apalagi Singapura menjadi hub (pusat kegiatan) ekonomi, politik, bisnis dan perdagangan tingkat dunia. Maka, menjadikan Jakarta sebagai markas besar sekretariat ASEAN menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, bahkan dunia, mempercayai Indonesia sebagai tempat yang menjadi penghubung antar negara-negara ASEAN yang dikenal dengan istilah Diplomatic City of ASEAN.¹⁸

Penetapan Jakarta sebagai markas sekretariat ASEAN tentulah berdasarkan berbagai faktor. Misalnya, tingkat keamanan yang tinggi, letak geografis yang strategis, sarana dan prasarana pendukung perkantoran yang lengkap, dll. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di ASEAN dalam hal keamanan dan kenyamanan, maka Jakarta merupakan kota yang memberikan keamanan dan kenyamanan.

¹⁸ibid.

Kehadiran sekretariat ASEAN di Jakarta membuka mata dunia sehingga mereka melihat Jakarta sebagai tujuan bisnis dan wisata. Untuk itulah Jakarta perlu meningkatkan berbagai sarana, terutama transportasi dan telekomunikasi, sebagai pendukung agar Jakarta setara dengan kota-kota metropolitan dunia. Karena, sekarang ini sarana dan prasarana transportasi tidak mendukung Jakarta sebagai kota metropolitan. Kemacetan yang berkepanjangan menjadi halangan karena tidak ada sarana transportasi massal yang bebas macet sebagai pilihan. Untunglah Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama satu visi dalam melihat kantor ASEAN sebagai salah satu potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung Jakarta sebagai kota tujuan bisnis, diplomasi dan wisata.

Memang, sebagai markas ASEAN Jakarta belum sebanding dengan Kota New York di Amerika Serikat, dan Zurich di Swiss dan Wina di Austria yang menjadi tempat kantor pusat lembaga-lembaga kelas dunia, seperti badan PBB, olah raga, dll. Tapi, dengan kantor ASEAN pun sudah merupakan kebanggaan bagi Jakarta (baca: Indonesia).

Pembangunan mass rapid transit (MRT), kereta layang monorel, merupakan salah satu pendukung agar Jakarta setara dengan kota metropolitan dunia. Wagub Ahok, julukan Basuki Tjahaja Purnama, sendiri sudah memikirkan untuk menjadikan kantor ASEAN sebagai salah satu tujuan wisatawan di Jakarta.

Ahok berharap kantor ASEAN itu kelak dibangun dengan arsitektur yang unik dengan ciri khas Asia sehingga bisa menjadi landmark dan icon Jakarta di kancan

bisnis, diplomatik dan turisme dunia. Sebagai kota dengan markas besar diplomatik, dalam hal ini negara-negara ASEAN, tentulah Jakarta menjadi incaran pelaku kejahatan internasional.

Untuk itulah pemerintah perlu membenahi sistem keamanan nasional dengan visi internasional agar dampak buruk dari kehadiran diplomat di Jakarta bisa ditanggulangi dengan baik. Sebenarnya tidak ada yang salah Jakarta dinobatkan sebagai kota diplomatik bagi ASEAN. Melihat sejarahnya, Kota Jakarta telah terkenal dan merasa paling siap secara tingkat keamanan dan infrastrukturnya.

Bagaimana dengan kondisi Jakarta yang masih macet jalannya, banjir dan becek jika musim hujan, transportasi masalnya yang belum memadai, apakah siap Jakarta dapat ketambahan status kota diplomatik ASEAN. Jakarta penuh dinamika. Ibukota Republik Indonesia ini juga digadang-gadangkan sebagai kota bertaraf internasional. Belakangan Jakarta dipromosikan sebagai Kota Diplomatik bagi kawasan Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Pertanyaannya, Apakah Jakarta siap dengan segala sesuatunya?

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba menyajikannya dalam sebuah penelitian dengan judul sebagai berikut:

“KESIAPAN INDONESIA KHUSUSNYA KOTA JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA DIPLOMATIK ASEAN MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN?
2. Apa Peluang dan Tantangan Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN bagi masyarakat?
3. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan kegiatan Komunitas ASEAN 2015?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, dirasa perlu untuk melakukan pembatasan-pembatasan guna pembahasan nantinya agar permasalahan yang ada tidak keluar topik yang sedang dibahas. Untuk itu penulis menitik beratkan penelitian terhadap Kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Diplomatik ASEAN. Serta kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 yang akan *deadline*-nya semakin dekat yakni 31 Desember 2015 nanti. Permasalahan permasalahan yang sudah mengakar di Kota Jakarta akan di bahas serta mekanisme seperti apa yang mesti dilakukan dalam mempersiapkan Jakarta untuk menghadapi Komunitas ASEAN 2015.

Sedangkan dimensi waktu dari 2009-2013 akan mempermudah penulis untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan diri dalam menyambut Komunitas ASEAN 2015 sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah diajukan dalam bentuk *research question* sebagai berikut:

“Sejauh mana Upaya Pemerintah Indonesia Khususnya Pemprov DKI Jakarta dalam menyabut Komunitas ASEAN 2015 sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan Jakarta Ibu Kota Diplomatik ASEAN.
- b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN.

- c. Untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan diri menyambut Komunitas ASEAN 2015.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

- a. Referensi akademik dan informasi tambahan bagi pengembangan studi ilmu Hubungan Internasional secara khusus, yaitu sebagai landasan studi berikutnya mengenai Komunitas ASEAN 2015 dan kesiapan Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN.
- b. Sumbangan ilmiah bagi perembangan khasanah studi ilmu Hubungan Internasional secara umum, khususnya mengenai kajian Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembandingan bagi studi-studi lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait yang dibahas dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai literature tambahan dalam mempelajari dan menganalisa masalah Hubungan Internasional.
- d. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Program S-1 pada jurusan ilmu Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi untuk membantu dalam pemecahan masalah, digunakan alat analisa berupa kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian. Penjelasan sementara ini merupakan argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.¹⁹

Penulis mengemukakan dan menjelaskan teori-teori dari para ahli yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini dan untuk memudahkan dalam menarik sebuah hipotesis.

Teori bukan sekedar kumpulan generalisasi; teori adalah pernyataan yang menjelaskan generalisasi itu. Sebagai sarana eksplanasi, teori adalah yang paling efektif. Dan dalam proses eksplanasi itu, teori membantu kita mengorganisasikan dan menata fakta yang kita teliti.²⁰

Secara lebih spesifik McCain dan Segal mendefinisikan teori sebagai:

“serangkaian statemen yang saling berkaitan ... (yang terdiri dari): 1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori ini; 2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; 3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement

¹⁹Lihat Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994:332

²⁰Muchtar mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional :Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES Indonesia,1994), hlm. 186-187.

teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesa).”²¹

Ketika menjelaskan suatu fenomena, teori memerlukan pembuktian secara sistematis. Artinya, teori harus diuji dengan bukti-bukti sistematis. Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisa yang jelas dan penggunaan data secara sistemik. Agar bisa didukung atau ditolak secara sistematis, teori harus memuat konsep-konsep yang jelas.

Penelitian ini menggunakan konsep Hubungan Internasional, kepentingan nasional, Kerjasama Internasional, kebijakan luar negeri, regionalisme dan organisasi internasional. Dalam pelaksanaannya, Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam menjadikan Jakarta sebagai ibu kota diplomatik ASEAN ini.

Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau Negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.²²

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh

²¹Garvin McCain dan Erwin Segal, *he Game of Science*, (Brooks/Cole, 1973). hlm.99.

²²Robert Jackson & George Sorensen, “Pengantar studi hubungan internasional”, (*Pustaka Pelajar*, Yogyakarta:2009). hlm. 2

karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain.²³

Mc.Clelland mengemukakan bahwa **“hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi”**.²⁴ Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non state actors*).²⁵

Hubungan internasional bukan hanya tentang hubungan Negara-negara, tetapi juga tentang hubungan transnasional, yaitu hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari organisasi yang berbeda.²⁶ Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*). Tentu yang diharapkan adalah berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, bagaimana mencegah dan menghindari

²³Ibid.

²⁴T. May Rudi, “Hubungan Internasional Kontemporer dan masalah-masalah global”, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

²⁵Charles A. McClelland, “Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem”, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), hlm. 27.

²⁶Robert Jackson, Op.cit. hlm. 144.

konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerjasama.²⁷

Definisi Hubungan internasional menurut Charles McClelland:

*“ the outermost boundaries of international relations are suggested if we imagine all of the exchanges, transaction, contacts, flows of information, and actions of every kind going on at this moment of time between and among the separately constituted societies of the world. To this picture in mind, we should add the effect created within societies from all such interflowing events in earlier times both of the immediate and the more remote past. Finally, the stream of these actions and responses should be conceived as moving on to the future of tomorrow and beyond, accompanied by the expectations, plans, and proposals of all observers of the phenomena”*²⁸

Menurut K.J Holsti dalam bukunya politik internasional suatu kerangka analisis, mengemukakan:

“Hubungan internasional adalah suatu interaksi diantara masyarakat dunia dan negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah atau negara lebih lanjut dikatakan termasuk didalamnya pengkajian politik luar negeri dan *rolling* serta meliputi segala hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional”.²⁹

Adapun istilah Hubungan internasional menurut Theodore A Coulombis dan James H. Wolfe dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power yang diterjemahkan oleh Mercedes Marbun mendefinisikan pengertian hubungan internasional sebagai:

²⁷ Charles A. McClelland, Loc. Cit.

²⁸Peter A.Toma & Robert F. Gorman, “International Relations: Understanding Global Issues”, (Brooks/Cole, California:1990), hlm. 13.

²⁹K.J Holsti, “Politik Internasional: Suatu kerangka Analisis, terjemahan juanda”,(Bandung: binacipta, 1978), hlm. 26.

“Suatu studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi diantara negara-negara yang berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahannya. Aktivitas-aktivitas diplomasi dan tentara yang melaksanakan politik luar negeri pemerintah negara-negara tersebut tidak lepas dari *balance of power* (perimbangan kekuatan), pencapaian kepentingan nasional, usaha untuk menemukan *world order* (keteraturan dan tata dunia) dan diplomasi yang *prudence* (hati-hati)”³⁰

Dalam hubungan internasional tentunya ada suatu hal yang mendasari suatu negara kenapa melakukan hubungan atau interaksi dengan Negara lain. Adanya suatu tujuan tertentu yang menjadi fokus suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain. Tujuan dan fokus tersebut adalah kepentingan nasional yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan interaksi dengan negara lain.

Hubungan Internasional bersifat kompleks, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara.³¹

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang dipemerintahannya,

³⁰Ibid.

³¹“hubungan internasional” dalam

<http://id.shvoong.com/socialscience/economics/2269961-hubungan-internasional/>, diakses pada sabtu 29 Nopember 2013.

meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasional itu, negara maupun aktor negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Maka dari itu, dari sinilah melahirkan suatu kerjasama internasional. Sesuatu yang tidak mungkin suatu negara dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain dalam era globalisasi seperti sekarang ini. dalam hal itu diperlukan suatu kerjasama diantara negara-negara yang mempunyai kepentingan tersebut. Mengenai hal ini konsep dari kerjasama internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis adalah sebagai berikut:

“Kerjasama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.”

Dengan adanya kerjasama internasional ini maka terbentuklah suatu organisasi internasional. Yang mana di dalamnya tercakup anggota-anggota yang ikut tergabung untuk melakukan kerjasama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Dewasa ini pola-pola kerjasama multilateral dan global perlu diperbanyak dan terus di tingkatkan, karena semakin luas dan banyak masalah global yang tidak bisa lagi diatasi atau ditanggulangi hanya oleh beberapa Negara saja, tetapi perlu

pemecahan masalah bersama-sama oleh banyak Negara dan dengann mengikutsertakan pula aktor-aktor non negara.

Salah satu aktor non Negara yang dimaksud adalah Organisasi Internasional. Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.³² Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non negara.³³

Secara konvensional, Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai: **“suatu peraturan formal yang melintasi batas-batas nasional dan menciptakan suatu kondisi bagi pembentukan perangkat institusional guna mendukung kerjasama antara anggota-anggotanya, baik itu dibidang keamanan, sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya”**.³⁴

Definisi Organisasi Internasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton terjemahan Wawan Djuanda dalam bukunya Kamus Hubungan Internasional mengemukakan bahwa “Organisasi Internasional adalah suatu ikatan formal yang

³²Clive Archer, *International Organizations*, London: Allen&Unwin Ltd, 1983, hlm.35.

³³Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe, *Introduction to International relations: Power and Justice*, New Delhi: Prentice Hall, 1986, hlm.276.

³⁴Jack, C. Plano & Roy Olton, *the Internasional Relations Dictionary*, Third edition, ABC Clio, Oxford, 1979, hlm 228.

melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, serta bidang lainnya”.

Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan kepentingan dari setiap negara maka dari itu prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya. Oleh karena itu negara-negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan antar negara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya.

“Organisasi internasional adalah suatu seni menciptakan atau mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka (berdaulat) untuk memberikan kemudahan dan merealisasikan tujuan bersama dan objektif” (Koesnadi Kartasasmita, 1986:7).

Definisi organisasi internasional menurut **McClelland** dalam buku “Organisasi Administrasi dan Internasional” karangan T.May Rudi:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antarpemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”(Rudy,1992:3).

ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan sinergi yang terjadi antara negara-negara di kawasan Asia tenggara. Regionalisme mukanya merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara yang berada pada suatu wilayah yang saling berdekatan. Selain karena faktor kedekatan geografis, faktor lain yang turut mendorong terbentuknya kerjasama regionalisme diantara negara-negara tersebut adalah kesamaan cultural identity.

Dalam tubuh suatu Organisasi baik nasional maupun internasional pasti tak luput dengan peran yang dijalankan. Peran ini dapat dirasakan jika memiliki sumbangsih atau kontribusi bagi lingkungan sekitar atau ada hal-hal yang memang ingin dicapai dan menjadi sasaran atas organisasi tersebut.

Peranan organisasi Internasional dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu Negara. Bahkan saat organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

- Sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

- Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara anggotanya untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri Negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
- Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.³⁵

Sebagai Instrumen ASEAN digunakan oleh Indonesia untuk tujuan tertentu, menjadi instrumen bagi kebijakan pemerintah khususnya Indonesia, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai Negara-negara di Asia Tenggara. Ketika Komunitas ASEAN di deklarasikan, maka implikasinya adalah di antara Negara-negara Asia Tenggara suatu kesepakatan telah disetujui dalam bentuk komunitas untuk mencapai tujuan bersama, dan sebagai pengaturan secara multilateral aktivitas Negara-negara dalam lingkup politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Komunitas ASEAN menjadidi penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional.

Peran kedua yang dimiliki ASEAN khususnya Komunitas ASEAN sebagai organisasi internasional adalah berguna sebagai forum atau arena dimana didalamnya terdapat aksi-aksi. Komunitas ASEAN sebagai fasilitator telah menyediakan tempat-

³⁵Yossi Melidiana, "Peranan ASEAN Scout Association For Regional Cooperation (ASARC) Terhadap Revitalisasi gerakan Pramuka Indonesia", Skripsi FISIP-HI Unpas Tidak diterbitkan, 2013, hlm. 19.

temat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul bersama-sama berdiskusi, bekerjasama, berdebat ataupun saling berbeda pendapat.

Peran ketiga adalah independen. Organisasi internasional dikatakan independen apabila organisasi tersebut dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan luar. Komunitas ASEAN merupakan sebuah bentuk dari cita-cita para pendahulu ASEAN. Yang mewujudkan kerjasama di bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Keputusan-keputusan atau agenda-agenda yang muncul adalah murni hasil dari pemikiran anggota-anggotanya.

Selanjutnya T. May Rudy dalam bukunya, menyebutkan bahwa berdasarkan ruang lingkup wilayah kegiatan dan keanggotaannya, organisasi dapat dibagi menjadi dua; Organisasi Internasional Global dan Organisasi Internasional Regional. Khusus berkaitan dengan Organisasi Internasional Regional beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi Negara-negara pada kawasan tertentu saja”.³⁶

ASEAN merupakan salah satu bentuk organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara, terdapat beberapa kesamaan tujuan dan kesamaan latar belakang. Dapat dikatakan bahwa di dalam ASEAN terdapat suatu keinginan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang lebih maju, mandiri dan damai. Yang mana hal tersebut tercantum dalam deklarasi Bangkok, yakni sebagai berikut:

³⁶T. May Rudy, *Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, (Bandung: Bina Budhayana, 1997), hlm. 3.

- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
- Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan ini serta memenuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
- Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu satu sama lain di dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi untuk kepentingan bersama.
- Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjaga segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Euforia Komunitas ASEAN turut membuat Negara-negara anggota ASEAN menjadi lebih impresif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mempersiapkan diri menghadapi Komunitas ASEAN 2015 yang di gadang-gadang menjadi sebuah arena bagi Negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, keamanan dan politiknya, serta sosial dan budayanya. Hal ini pun turut mempengaruhi Indonesia dalam mempersiapkan diri sebagai peserta

dari Komunitas ASEAN 2015 ini. Berkat diplomasi dari para diplomat Indonesia, pada KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja, Menteri Luar Negeri Indonesia Marthy Natalegawa menyerahkan proposal *Jakarta as The Diplomatic Capital City of Southeast Asia Nations*.

Suatu interaksi diantara negara di dalam suatu kawasan dapat terbukti dalam *Regionalisme*, dimana faham atau isme tersebut menunjukkan bahwa kerjasama antar negara-negara dalam suatu kawasan yang muncul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi atau dengan kata lain kebutuhan juga berarti kepentingan untuk berinteraksi dengan negara lain. Adapun definisi *Regionalisme* menurut Jack Plano dan Roy Olton yaitu:

Regionalisme adalah konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerja sama melalui organisasi dan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer dan politik. Regionalisme memberikan hampiran mencegah untuk mengatasi permasalahan, yaitu berada di Uniteralisme dan Universalisme.³⁷

Dari definisi tersebut tentang kawasan dapat dianalisa bahwa negara-negara atau organisasi internasional tidak bertindak sendiri-sendiri tetapi sebagai suatu kelompok dimana kelompok tersebut memiliki tujuan yang dilandasi kelompok oleh kepentingan kelompok sendiri.

³⁷ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Putra A Bardin, Bandung, 1999. Hlm 250.

Menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN merupakan sebuah kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang jelas dilandasi oleh kepentingan nasional Negara Republik Indonesia. Menurut Rosenau, Pengertian kebijakan luar negeri yaitu : **“Upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya”**.³⁸

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri adalah sebagai berikut:

“semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut”.³⁹

Setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia, pasti berdasarkan kepentingan nasional Republik Indonesia. Adapun pengertian Kepentingan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah :

“kepentingan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴⁰

Kepentingan nasional pada dasarnya bersifat abstrak, sehingga tidak ada definisi yang mutlak tentang kepentingan nasional. Namun, secara garis besar,

³⁸Teuku May Rudi, *Hubungan Internasional Kontemporer dan masalah-masalah global: isu, konsep, teori dan paradigma*, (Bandung: Refika Aditima, 1993), hlm. 55.

³⁹Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 49.

⁴⁰Ahmad, “Kepentingan nasional Indonesia di Dunia Internasional”, *Multiply*, 01 September 2007, dalam :<http://why.multiply.com/journal/item/9>, diakses pada 29 Nopember 2013

kepentingan nasional dapat diartikan sebagai cita-cita atau tujuan dan harapan yang ideal dari sebuah negara terhadap negaranya. Dalam usaha mewujudkan kepentingan nasional tersebut, ada cara-cara tertentu yang harus ditempuh oleh sebuah negara. Cara-cara tertentu yang dilakukan dalam rangka merealisasikan kepentingan nasional sebuah negara itu kemudian disebut sebagai kebijakan luar negeri. Bagian terakhir yang sangat penting, dan sangat erat terkait dengan kepentingan nasional adalah power. Power merupakan modal yang harus dimiliki masing-masing negara dalam rangka merealisasikan kepentingannya. Kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, dan power tersebut sifatnya saling mengait, sehingga tidak dapat dipisahkan. Tujuan utama dan mendasar dari kepentingan nasional itu sendiri ialah eksistensi negara, agar sebuah negara dapat terus mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah negara.⁴¹

Adapun kepentingan nasional menurut Suffri Yusuf mendefinisikan sebagai berikut:

“Kepentingan nasional diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk diperjuangkan dalam rangka ketertiban internasional dimana kepentingan nasional dibentangkan kepada rakyat sebagai doktrin-doktrin dan dalam suatu negara, kepentingan nasional dapat berubah sewaktu-waktu, situasi dan kondisi”,⁴²

⁴¹Hanifah Nilasari, “Peranan ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR) dalam mengatasi pelanggaran HAM di Myanmar”, Skripsi FISIP-HI UNPAS tidak diterbitkan, 2013, hlm.18.

⁴²Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah analisis dan uraian tentang pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm. 77.

Dan dipertegas menurut pendapat Sumpena Perwira Saputra:

“Kepentingan nasional (*nasional interest*) dipahami sebagai konsep dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun sistem nilai sebagai pedoman perilaku negara tersebut. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun terjadi atas dasar kepentingan. Namun bisa juga terjadi *interplay* ideologi dengan kepentingan sehingga terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru”.⁴³

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan tempat berdirinya negara – negara anggota ASEAN. ASEAN yang dibentuk dari Deklarasi Bangkok ini berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara pelopor terbentuknya ASEAN. Pada KTT ASEAN ke – 1 negara – negara ASEAN menyepakati kedudukan ibu kota ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia. Jakarta menjadi ibu kota ASEAN yang tentunya sebagai tempat sekretariat ASEAN. Indonesia mendapat kepercayaan dari negara – negara anggota ASEAN untuk menjadi pusat sekretariat ASEAN. Dalam hal ini Indonesia sebagai diplomatic city of ASEAN karena Indonesia sebagai penghubung diplomasi negara – negara di ASEAN. Hal ini tentunya menjadi suatu

⁴³Sumpena Prawira Saputra, *Politik Luar negeri Indonesia*, (Jakarta: Remaja Karya Offset, 1985), hlm. 24.

kebanggaan bagi Indonesia khususnya Jakarta. Dari sekian banyak kota di negara – negara ASEAN, Jakarta terpilih sebagai pusat kegiatan ASEAN.⁴⁴

Terpilihnya Jakarta sebagai pusat sekretariat ASEAN tentunya bukan tanpa pertimbangan. Beberapa pertimbangan Jakarta dijadikan ibu kota ASEAN adalah letak Indonesia yang strategis menjadi suatu pertimbangan untuk dijadikan pusat sekretariat ASEAN. Dari dulu Indonesia merupakan negara yang dilintasi untuk perdagangan internasional karena letaknya strategis. Alasan yang sama pun menempatkan Indonesia sebagai pusat sekretariat ASEAN. Indonesia memiliki banyak kota, tapi Jakarta lah yang terpilih sebagai ibu kota ASEAN. Tentunya karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia.

Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta mendapatkan akses yang sangat mudah dijangkau. Pusat pemerintahan yang terletak di Jakarta, memudahkan untuk melaksanakan kegiatan dan urusan politik luar negeri dan diplomatik akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, penempatan sekretariat ASEAN di Jakarta karena peran Indonesia di ASEAN cukup besar. Indonesia sebagai salah satu negara pelopor terbentuknya ASEAN. Indonesia banyak membantu negara – negara lain dalam penyelesaian permasalahannya bahkan menjadi penengah konflik untuk negara – negara ASEAN yang berkonflik. Indonesia membantu Kamboja dalam mencapai kemerdekaannya, begitupun dengan Myanmar yang mencoba untuk demokratisasi dengan sistem politik.

⁴⁴Widya rahmawaty, "Jakarta Be A Diplomatic City of ASEAN",wordpress.com, 4 september 2013, dalam <http://widdyawr.wordpress.com/2013/09/04/jakarta-be-a-diplomatic-city-of-asean/>, diakses pada 5 januari 2014.

Sistem politik di Indonesia memang kompleks, tapi untuk hubungan politik luar negeri Indonesia cukup baik dan stabil. Maka dari itu Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dijadikan sebagai ibu kota ASEAN. Karena politik yang seimbang akan mendorong hubungan diplomatik regional ASEAN pun akan baik. Tak hanya itu, Indonesia pun memberikan kontribusi bagi kerjasama – kerjasama yang telah dan akan dibentuk di ASEAN.

Kedudukan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN, maka akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap Jakarta maupun Indonesia. Banyak sekali dampak positif yang dapat diambil dari kedudukan Jakarta sebagai kota diplomasi di ASEAN yaitu dapat mengenalkan Jakarta dan Indonesia kepada ASEAN maupun internasional. Negara – negara lain tentunya akan lebih mengenal Jakarta dan Indonesia. Sebagai pusat diplomasi, tidak jarang Jakarta dijadikan tempat pertemuan bagi para delegasi negara ASEAN.⁴⁵

Bahkan tidak jarang di sela – sela pertemuan tersebut disajikan penampilan tradisional dari Indonesia juga dijamu makanan tradisional Indonesia. Dengan demikian, memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada ASEAN. Sehingga budaya dan makanan tradisional Indonesia diketahui dan dikenal oleh negara lain. Dengan adanya kunjungan dari luar negeri ke Indonesia dan Jakarta dapat lebih mengenal sejarah dan tempat – tempat bersejarah di Jakarta. Dengan banyaknya kunjungan para delegasi luar negeri ke Indonesia khususnya Jakarta maka akan meningkatkan perekonomian negara maupun daerah. Karena banyak pendapatan yang masuk.

⁴⁵lb.id

Banyaknya kunjungan ini pula dapat meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara – negara lain sehingga tercipta hubungan internasional yang baik. Pembangunan di Jakarta pun akan baik, karena sebagai ibu kota ASEAN tentunya tidak ingin Jakarta terlihat biasa saja. Hal ini akan mendorong aktivitas pembangunan di Jakarta yang tentunya akan berdampak baik pada masyarakat dan pembangunan Jakarta sendiri.

Di lain hal, penempatan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN pun menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan Jakarta. Seperti, munculnya kesenjangan akibat pembangunan yang tidak merata karena pembangunan cenderung dilakukan di daerah – daerah pusat. Sehingga menyebabkan pembangunan pesat hanya terjadi di pusat – pusat pemerintahan saja sedangkan daerah lain masih tertinggal. Ini jelas dapat menimbulkan kesenjangan di Jakarta. Namun, kini Jakarta mulai melakukan pembangunan di daerah – daerah tertentu untuk pemerataan pembangunan dan mempersempit kesenjangan. Kunjungan pejabat luar negeri ke Jakarta tidak jarang memerlukan protokoler negara sehingga beberapa ruas jalan harus disterilkan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan. Kemacetan ini akan menghambat sebagian warga Jakarta dalam melaksanakan aktivitasnya. Sehingga perlu adanya upaya untuk membenahi supaya keduanya dapat berjalan dengan baik.

Sebagai sekretariat pusat ASEAN, tentunya Jakarta harus mempunyai kesiapan dalam melaksanakan tugas ini. Kesiapan yang harus dilakukan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN adalah membangun infrastruktur. Pembangunan infratsruktur sangat diperlukan guna menunjang kegiatan operasional kesekretariatan ASEAN di Jakarta

maupun saat akan ada kunjungan atau pertemuan ASEAN. Di bawah naungan Kementerian Luar Negeri, tentunya harus mempersiapkan pegawai – pegawai yang nantinya akan bekerja untuk sekretariat ASEAN. Kesiapan secara sosial, politik dan ekonomi pun perlu dilakukan. Kesiapan sosial masyarakat dengan pembangunan pesat. Masyarakat harus mampu mengikuti arah pembangunan supaya tidak ada ketimpangan yang besar. Sebagai ibu kota ASEAN, tentunya Jakarta harus membangun itu. Begitupun dengan politik dan ekonomi. Kestabilan politik dalam negeri harus dijaga supaya dapat menjaga hubungan diplomatik dan politik di ASEAN. Kesiapan ini harus dipersiapkan oleh Jakarta supaya sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta ini dapat menjadi barometer hubungan internasional. Sehingga kontribusi Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatik dapat dipercayai negara – negara tidak hanya ASEAN tetapi juga internasional.

Pusat ASEAN di Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai diplomatic city of ASEAN. Indonesia mempunyai peran besar dalam menjaga hubungan diplomatik negara – negara ASEAN. Suatu kebanggaan bagi Indonesia dapat dipercaya menjadi pusat sekretariat ASEAN yang menempatkan Jakarta sebagai ibu kota ASEAN. Diharapkan dengan pusat sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta ini, Indonesia dapat menjadi penyeimbang bagi negara – negara ASEAN serta meningkatkan perannya di ASEAN bahkan internasional guna menjaga hubungan diplomatik dengan negara – negara lain.

Kota Jakarta dikenal pusat bisnis di Indonesia, bahkan dahulu jaman eranya penjajahan kolonial negara barat, pelabuhan Sunda Kelapanya dianggap yang paling tersibuk di dunia bersama Gujarat dan Makassar Bugis.⁴⁶

Pekerjaan rumah Jakarta masih menggunung, dari persoalan transportasi masal, urbanisasi, pemukiman penduduk, kesehatan dan pendidikan warga, kelestarian lingkungan, tenaga kerja dan turunan lain-lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu disini.⁴⁷

Dari latar belakang penelitian dan berbagai teori yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa asumsi pada topik yang diangkat. Adapun yang menjadi asumsi penulis yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut :

Karena dalam pelaksanaannya Organisasi Internasional merupakan suatu instrumen, arena dan aktor independen bagi Negara-negara anggotanya. Maka kepentingan nasional akan mempengaruhi dinamika organisasi internasional dalam pelaksanaannya.

Kebijakan Indonesia dalam mengajukan Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN dikarenakan adanya kepentingan negara Republik Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi Komunitas ASEAN 2015.

⁴⁶Budi Susilo, "Duh Ile Jakarta Kota Diplomatik Ngaca Yah", *Jongfajar Kelana*, 4 September 2013, <http://budisusilo85.blogspot.com/2013/09/jakarta-kota-diplomatik-asean.html>, Diakses pada Sabtu 29 Nopember 2013.

⁴⁷ Op. cit

Terpilihnya Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN tersebut berimplikasi terhadap kondisi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Dengan kondisi Kota Jakarta pada saat ini dengan berbagai pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan akan berdampak kepada kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015.

1. Hipotesis

Setelah merumuskan kerangka teoritis diatas, langkah selanjutnya adalah mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara. Terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Didalamnya terdapat hubungan dua variabel atau lebih yang diuji secara empiris guna menentukan kesahihannya (reliabilitas).⁴⁸ Hipotesis ini dirumuskan dengan proses logika deduktif dan diuji melalui logika induktif.⁴⁹ Seraya dikonsultasikan lewat preposisi, konsep, teori dan asumsi yang berperan sebagai tolak acuan dalam mempelajari suatu fenomena yang menarik untuk diajukan penelitian (pengkajian).

Dari tatanan teori-teori dan konsep-konsep serta asumsi diatas, maka diajukan *Hipotesis* sebagai berikut:

⁴⁸Plato et. Al., 1989, hal.107, seperti dikutip dalam Skripsi HI FISIP UNPAS tidak diterbitkan hanifah nilasari, 2013.

⁴⁹ Mohtar Mas' oed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan metodologi", LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.208-209.

“Terpilihnya Kota Jakarta sebagai Ibu kota Diplomatik ASEAN akan berimplikasi positif terhadap kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015”

2. Operasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan, kalau kita hendak mengetahui eksistensi empiris suatu konsep.⁵⁰ Dalam pengoperasionalan variabel diatas, agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis tadi diperlukan indikator mengenai variabel-variabelnya, untuk dapat mempengaruhi dan dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perannya.

Sehingga kita dapat menentukan pernyataan yang dikandung hipotesis didukung oleh kenyataan yang bersifat faktual, atau hipotesis itu perlu di revisi.

Tabel 1.1 Operasional Variabel

Variabel dalam hipotesis (teoritik)	Indikator	Analisa data
<i>Variabel Bebas:</i> Terpilihnya Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Diplomatik	1. Membuat rancangan kawasan khusus ASEAN di Kota Jakarta	1. Perencanaan kawasan khusus ASEAN di daerah Jakarta oleh Asosiasi Perencanaan Indonesia, sebagaimana dipaparkan oleh

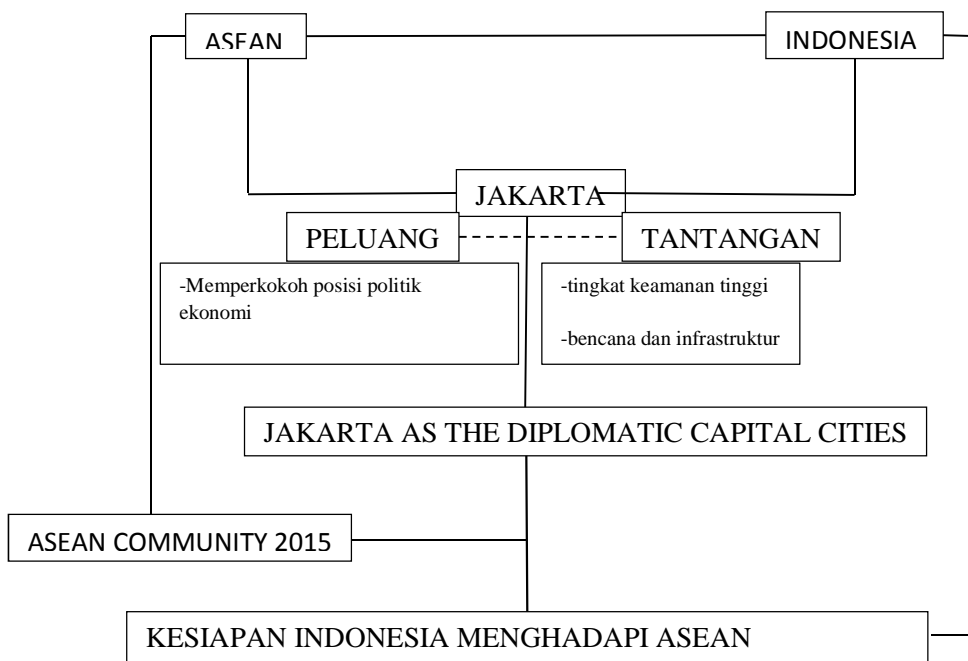
⁵⁰ibid.

ASEAN	tepatnya jakarta selatan.	Bernardus Djonoputro – Secretary General of Indonesia Associations of Urban & Regional Planners (IAP)(dokumen bagian Data Kertas Kerja Sesditjen KSA Kemenlu RI)
	2. Menlu Marty M. Natalegawa secara resmi menyerahkan Piagam Pengesahan (Instrument of Ratification) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Sekretariat ASEAN kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.	2. Pada KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja. Dengan resmi Indonesia disepakati sebagai Ibu Kota Diplomatik ASEAN. (http://jakarta.kompasiana.com/potensi-wisata/2013/09/05/siapkan-jakarta-jadi-tuan-rumah-diplomatik-asean-589053.html). 3. Berdirinya markas ASEAN (Sekretariat ASEAN) di Jl. Sisingamangaraja 70A Jakarta Selatan. (<i>Kompasiana.com</i> , Jakarta, 4 September 2013, http://jakarta.kompasiana.com/potensi-wisata/2013/09/04/markas-besar-asean-menjadikan-jakarta-sebagai-diplomatic-city--588890.htm).
<i>Variabel Terikat: Implikasi positif terhadap Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Komunitas ASEAN</i>	3. Adanya pertemuan Gubernur dan walikota Ibu Kota Negara-negara Anggota ASEAN.	4. Pada 17-19 September 2013, di Jakarta Indonesia berinisiatif mengadakan ASEAN Governors and Mayors of Capital City of ASEAN dengan tema “ASEAN Goes Local” dengan Gubernur DKI

2015.		<p>Jakarta Joko Widodo sebagai Leader dalam pertemuan itu. (http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/governors-and-mayors-of-asean-capitals-meet-in-jakarta-to-support-asean-community-2015).</p>
	<p>4. Adanya ASEAN 4000 ASEAN Holding Hands sebagai simbolik kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Community 2015 sekaligus mendeklarasikan Jakarta as the diplomatic capital cities of ASEAN.</p>	<p>5. Pada Minggu 15 September 2013, di Monumen Nasional, Jakarta. Masyarakat Indonesia melakukan Salam ASEAN, mengelilingi Monas sebagai simbolik bahwa masyarakat Indonesia telah sadar dan akan berpartisipasi dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015.</p>

3. Skema Kerangka Teoritis

Gambar 1.1 Skema Teoritis



E. Tingkat Analisis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Analisis

Penggunaan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional penting dilakukan untuk memudahkan memilih dan memilah masalah yang paling layak ditekankan atau yang dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis yang disebut *fallacy of composition* dan *ecological fallacy*.⁵¹

Ada tiga tingkat analisis yang umum digunakan dalam studi hubungan internasional, yaitu: individu dan kelompok, Negara-Bangsa, dan sistem regional dan global.⁵²

Untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan antara unit analisis dengan unit eksplanasi, ada 3 unit yang bisa dilihat:

- Analisa reduksionis, yaitu unit eksplanasi pada tingkat yang lebih rendah.
- Unit Korelasionalis, yang unit eksplanasinya dan unit analisisnya pada tingkat yang sama.
- Analisa Induksionalis, yang unit analisisnya pada tingkatan yang lebih tinggi.

Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan analisa induksionalis, dimana Indonesia khususnya pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai obyek yang akan

⁵¹Ibid, hlm. 36-37.

⁵²Untuk melihat jenis-jenis isu dan fenomena hubungan internasional/politik internasional masuk pada tingkat analisis yang mana sebaiknya baca buku Mohtar mas'ood, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi (Yogyakarta : PAU, Studi sosial UGM, 1989), juga bukunya A. Valendana Teori of Internasional Politik (Kampur, India:Vikas Publishing co. Ltd, 1996), Khususnya bab Level of Analisis.

menjadi *Diplomatic Capital Cities of ASEAN* lebih rendah dari pada ASEAN itu sendiri khususnya Komunitas ASEAN 2015 sebagai Arena dimana Indonesia menjadi peserta dalam perhelatan akbar tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan dan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan penelitian yaitu:

Metode Penelitian Deskriptif, metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, mengintegrasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebagai analisa serta dalam rangka pembahasan skripsi ini, maka penulis memilih teknik pengumpulan data yang dipakai untuk melakukan penelitian adalah studi kepustakaan/literatur dimana penulis melakukan penelaahan data terhadap buku-buku teks, jumlah ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar,

laporan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, maupun data data yang terdapat dalam website dan internet.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan informasi tertulis di lokasi yang dianggap akan memberikan informasi yang akan mendukung penelitian ini, yaitu:

- Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung
- Kementerian Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat
- ASEAN Secretariat Jl. Sisingamangaraja 70A Jakarta Selatan
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan

2. Lamanya Penelitian

Penelitian ini sejak awal pengajuan judul sampai terbentuknya skripsi ini membutuhkan waktu enam bulan, terhitung dari akhir Nopember 2013 sampai Mei 2014. Adapun tahap tahapnya sebagai berikut (lihat tabel 1.2 dibawah ini)

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan proses pembahasan tulisan dan membantu penulis dalam penguraiannya, maka keseluruhan dari isi skripsi ini dirngkum dalam sistematik penulisan sebagai suatu paradigma berpikir. Dengan pedoman pada sistematika penulisan karya ilmiah pada umumnya maka penulis berusaha untuk mendeskripsikan gambaran umum yang berhubungan dengan cakupan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS

Pada Bab II ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Bab ini akan terdiri dari uraian mengenai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah DKI Jakarta, Kawasan Spesial ASEAN di Jakarta, ToR dan RAB pembentukan ASEAN Special Zone, dan Permasalahan permasalahan di Jakarta seperti kemacetan, urbanisasi, Banjir, dan Lingkungan Hidup.

BAB III OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT

Dalam Bab III ini berisi Uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat

dari variabel lain. Pada penyusunan kripsi ini yang menjadi variabel terikatnya mengenai Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015.

BAB IV VERIFIKASI DATA

Dalam Bab VI ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

BAB V KESIMPULAN

Dalam Bab V ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah dilakukan.